

**KEMISKINAN STRUKTURAL DAN HUBUNGAN PATRON KLIEN NELAYAN
DI DESA MAITARA KECAMATAN TIDORE UTARA
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Oleh

Akbar Suleman ¹

Maria Heny Pratiknjo ²

Nasrun Sandiah ³

ABSTRACT

In the social context, the characteristics of the fishing communities vary with the characteristics of the farming community, along with the difference in the characteristics of the resources at hand. Fishermen face access resources that are currently still are open access. Characteristics of resources such as these cause the fishermen must be moving in order to obtain maximum results, so the risk becomes very high. The condition of the resources that are at risk of the fishermen have a hard character, firm, and open.

The fishing Maitara can be grouped into several groups of fishermen i.e. that traditional fishing activities of catching fish by using a capture tool that still are simple so bring a limited range that is the marine environment Maitara.

With the economic limitations due to uncertainty resulting from the income of fishermen were forced to seek refuge to another person that is the owner of the ship in order to guarantee the sustainability of life. The pattern of the working relationship which is reflected in the relationship between the client-patron and owner laborer fishermen is to guarantee a growing socio-economic communities. The mechanism of this working relationship are dependency, patron (owner fishers) had the capital and capture tool while clients (workers) have the power to run the business of the owner of the boat.

Patron-client relationships can drive economic activity because it provides employment for workers of the fishing result in accordance agreement between them so influential in meeting the needs of their life.

Keyword: fishermen, patron-client, resources

¹ Mahasiswa Antropologi Fispol Unsrat

² Dosen Pembimbing I KTIS

³ Dosen Pembimbing II KTIS

Pendahuluan

Letak geografis Indonesia dan lautnya begitu luas, wajar kalau terdapat banyak aktivitas kehidupan penduduknya berada di sekitar pantai sebagai nelayan. Dalam konteks sosial, karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat petani, seiring dengan perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi. Nelayan menghadapi akses sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat *open access*. Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan mesti berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal, dengan demikian risiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang berisiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka.

Ketika musim panen ikan, nelayan bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi, sedangkan pada musim paceklik nelayan memperoleh penghasilan yang sangat rendah. Tidak setiap hari dalam setahun nelayan dapat pergi melaut karena usaha nelayan yang sangat bergantung pada kondisi alam. Ketika cuaca buruk seperti ketika

hujan disertai angin kencang dan ombak besar, nelayan tidak dapat melaut karena dapat membahayakan keselamatan mereka.

Meskipun kekayaan laut Indonesia begitu besar, namun ternyata hal itu belum tentu membuat kehidupan nelayan sejahtera. Nelayan dipandang sebagai masyarakat yang tingkat kesejahteraannya paling rendah jika, dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain.

Nelayan di Maitara dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok nelayan tradisional yaitu nelayan yang melakukan aktivitas menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang masih bersifat sederhana sehingga jangkauan tangkapannya terbatas yaitu di sekitaran laut Maitara. Nelayan buruh adalah orang yang bekerja di kapal orang lain, biasa kapal yang digunakan nelayan buruh sudah cukup modern yaitu jenis pole and line sehingga daya jangkauannya cukup jauh. Nelayan pemilik adalah orang memiliki kapal dan peralatan tangkap, mereka ini biasanya tidak melaut, mereka hanya mengontrol dan memonitoring ketika nelayan

buruh sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Akibat dari ketidak mampuan untuk memenuhi peralatan tangkap yang lebih modern, maka dalam menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan sebagian penduduk Maitara mengantungkan hidupnya pada orang yang memiliki perahu atau kapal dengan bekerja sebagai buruh nelayan. Setiap harinya nelayan bekerja berdasarkan aturan main pemilik kapal, dan nantinya akan diberikan kompensasi berupa upah.

Hubungan kerja yang terjadi antara nelayan dan pemilik perahu di desa Maitara merupakan hubungan kerja biasa yaitu hubungan kerja yang dilakukan secara lisan tanpa ada ketentuan hukum yang mengikat. Sehingga ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi seperti, ABK tidak dapat bekerja dalam waktu yang lama, karena suatu hal atau juragan mencari ABK baru karena ABK lama tidak bekerja dengan baik.

Hubungan patron klien yang terjadi antara pemilik perahu dengan nelayan buruh tidak selamanya menguntungkan keduanya karena

dapat dilihat bahwa di sini dominasi pemilik perahu sangat besar. Ketergantungan nelayan buruh kepada pemilik perahu adalah bukti bahwa betapa lemahnya mereka di hadapan pemilik perahu.

Sistem pembagian upah masih bersifat tradisional yaitu ditentukan langsung oleh Juragan, tanpa ada kesepakatan yang di buat terlebih dahulu dengan ABK, upah yang di peroleh tergantung dari hasil tangkapan, jika hasil tangkapan banyak maka langsung dipasarkan sehingga upah yang di peroleh berupa uang, akan tetapi jika hasil tangkapannya sedikit sehingga tidak dimungkinkan untuk dipasarkan maka ikan dari hasil tangkapan yang menjadi upah.

Kebudayaan

Dalam kehidupan Manusia kebudayaan memiliki peran yang sangat penting, karena perilaku dan aktivitas sosial dari manusia selalu merupakan perwujudan dari nilai maupun norma ataupun pandangan-pandangan yang dianut oleh individu sebagai bagian dari masyarakat dimaksud. Menurut (spradley, 1997) Kebudayaan adalah

pengetahuan yang diperoleh manusia, yang digunakannya untuk menginterpretasi pengalaman, dan melahirkan tingkah laku. Ditekankannya bahwa konsep kebudayaan terfokus pada pengetahuan budaya yang diperoleh seseorang dari proses belajar untuk digunakannya dalam menginterpretasi lingkungannya, sehingga dilahirkan suatu proses adaptasi. Sebagai suatu sistem makna, pengetahuan budaya yang dimiliki bersama itu dipelajari, diperbaiki, dipertahankan, dan didefenisikan dalam konteks berinteraksi (Spradley, 1997). Lebih lanjut bagi Spradley, manusia selalu membutuhkan sesuatu yang merupakan sistem pengetahuan untuk menginterpretasikan dunia mereka, yang menyebabkan terwujudnya tingkah laku sosial sebagai hasil pemahaman dan penafsiran mereka, yang disebut juga kebudayaan.

Dalam konteks pengetahuan tersebut, kebudayaan memuat konsep-konsep yang digunakan pemilikinya dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada dalam lingkungannya (alam, budaya, sosial), dan memanfaatkannya demi pemenuhan kebutuhan hidup

mereka. Seseorang akan mencari pengetahuan yang dianggapnya sesuai, dan mewujudkannya dalam tindakan-tindakan berupa dorongan-dorongan atau motivasi dalam diri pelaku untuk memenuhi kebutuhan atau tanggapan (respons) terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan. (Suparlan, 1999).

Nelayan

Pengertian nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang atau masyarakat yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan. Selain itu, Imron yang dikutip dalam Subri (2005) nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Imron dalam Subri, 2005).

Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga

memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku sehari-hari. Faktor kebudayaan inilah yang membedakan antara masyarakat nelayan dengan kelompok sosial lainnya. Masyarakat nelayan sangat bergantung pada sumber daya perikanan, baik itu perikanan di laut maupun di muara, yang saat ini aksesnya masih bersifat terbuka, sehingga kondisi lingkungan wilayah pesisir dan laut menentukan keberlanjutan kondisi sosial ekonomi mereka.

Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) nelayan buruh, (2) nelayan juragan, dan (3) nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain (Mulyadi, S. 2005).

Berdasarkan golongan sosial nelayan dapat dilihat dari tiga sudut pandang (Hadi, 2000), yaitu :

1. Dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan lainnya), struktur masyarakat ini terbagi menjadi kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan Buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu, nelayan Buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas.
2. Dari skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi menjadi nelayan besar di mana jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, dan nelayan kecil justru sebaliknya.
3. Dari tingkat teknologi peralatan tangkap ikan, yang terbagi menjadi modern yaitu nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dari nelayan tradisional.

Menurut Ian Roxborough dalam Apridar dkk, (2011), bahwa: "Struktur sosial nelayan khususnya nelayan tradisional dan nelayan buruh, biasanya amat lemah di depan "juragan"(pemilik faktor produksi berupa kapal, alat tangkap dan modal), sekaligus kompleks. Posisi mereka tak memiliki politik-ekonomi untuk melakukan suatu perlawanan terhadap hegemoni "pemilik" faktor produksi. Bahwa mereka amat bergantung pada juragan melalui mekanisme hubungan patron-klien. Amat sulit melepaskan mereka dari hubungan itu karena sifatnya tak hanya bersifat produksi tapi ada hubungan bersifat kedekatan. Mereka menganggap posisi juragan sebagai juru selamat saat mereka tidak memiliki uang sehingga kebutuhan hidup lainnya".

Kemiskinan Struktural

Pada umumnya, para ahli sependapat bahwa kemiskinan adalah ketidaksanggupan individu atau kelompok untuk memperoleh barang-barang dan pelayanan-pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sosial terbatas, atau standar kehidupan yang layak karena terbatasnya

pendapatan. Kemiskinan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah (natural) dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya sumber daya lingkungan atau tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada pada suatu masyarakat telah menghambat akses masyarakat yang bersangkutan untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia untuk mereka (Soetrisno, 2001). Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem kapitalis, kemiskinan yang menimpa masyarakat kita adalah kemiskinan struktural.

Secara umum, kemiskinan masyarakat pesisir ditengarai disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung

boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan Pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagai salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir.

Patron-klien

Masyarakat pesisir yang tinggal di pesisir pantai rentan terhadap hubungan patron-klien, yang akhirnya memerlukan hubungan yang sangat erat kepada patron mereka sendiri. Satria (2002), berpendapat bahwa: "Ciri umum struktur sosial dalam masyarakat nelayan umumnya adalah kuatnya ikatan patron-klien. Kuatnya ikatan patron-klien tersebut merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Bagi nelayan, menjalin ikatan dengan patron merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan kegiatannya karena pola hubungan patron-klien merupakan institusi jaminan sosial ekonomi. Hal ini terjadi karena hingga saat ini nelayan belum menemukan alternatif institusi yang mampu menjamin kepentingan

sosial ekonomi mereka. Dalam struktur sosial masyarakat pesisir.

Menurut Scott dalam (Kusnadi, 2000) Hubungan patron klien adalah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental di mana seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (klien). Klien kemudian membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa pribadi kepada patronnya. Sebagai pola pertukaran yang tersebar, jasa dan barang yang dipertukarkan oleh patron dan klien mencerminkan kebutuhan yang timbul oleh masing-masing pihak.

Pola relasi seperti di atas di Indonesia lazim disebut sebagai hubungan "bapak-anak buah", di mana bapak mengumpulkan kekuasaan dan pengaruhnya dengan cara membangun sebuah keluarga

besar atau *extended family*. Setelah itu, bapak harus siap menyebar luaskan tanggung jawabnya dan menjalin hubungan dengan anak buahnya tersebut secara personal, tidak ideologis, dan pada dasarnya juga tidak politis. Pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada patron (Scott, 1993). Menurut Scott ciri-ciri hubungan patron-klien adalah sebagai berikut:

1. Karena adanya kepemilikan sumberdaya ekonomi yang tidak seimbang.
2. Adanya hubungan resiprositas, yaitu hubungan yang saling menguntungkan, saling memberi dan menerima walaupun dalam kadar yang tak seimbang
3. Hubungan Loyalitas yaitu kesetiaan atau kepatuhan.
4. Hubungan personal merupakan hubungan yang bersifat langsung dan intensif antara *patron* dengan *client*, yang menyebabkan hubungan terjadi tidak bersifat semata-mata bermotifkan keuntungan saja melainkan juga mengandung unsur perasaan yang bisa

terdapat dalam hubungan yang bersifat pribadi.

Tujuan dasar dari hubungan patron klien, yang sebenarnya adalah penyediaan jaminan sosial dasar bagi subsistensi dan keamanan. Apabila hubungan dagang/pertukaran yang menjadi dasar pola hubungan patron klien melemah, karena tidak lagi memberikan jaminan sosial dasar bagi subsistensi dan keamanan, maka klien akan mempertimbangkan hubungannya dengan patron menjadi tidak adil dan eksploitatif. Yang terjadi kemudian legitimasi bukanlah berfungsi linear dari neraca pertukaran itu. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika ada tuntutan dari pihak klien terhadap patronnya untuk memenuhi janji-janji atau kebutuhan dasarnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Dalam penelitian ini patron adalah sebutan untuk pemilik perahu, merupakan orang yang mempunyai tingkat ekonomi yang lebih dan mempunyai posisi sosial yang lebih tinggi. Sedangkan klien adalah sebutan untuk nelayan buruh, yang posisi sosialnya rendah dan memiliki keterbatasan sumber daya.

Interaksi Simbolik.

Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberikan makna. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan bahkan diri mereka sendiri yang menentukan perilaku manusia. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan peranannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial, lihat Mulyana, (2000).

Menurut teori interaksi simbolik kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol,

mereka tertarik pada manusia yang menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi tersebut.

Menurut Alex Sobur, (2004) Secara ringkas teori interaksionisme simbolik didasarkan pada premis-premis berikut:

1. Individu merespons suatu situasi simbolik, mereka merespons lingkungan termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan media yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka.
2. Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melihat pada objek, melainkan dinegosiasikan penggunaan bahasa, negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan

atau peristiwa) namun juga gagasan yang abstrak.

3. Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial, perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri.

Strategi Adaptasi

Adaptasi diartikan sebagai kapasitas individu untuk mengatasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada umumnya proses tingkah laku yang didasarkan faktor-faktor psikologis untuk melakukan antisipasi kemampuan melihat tuntutan di masa yang akan datang. Dengan demikian adaptasi merupakan tingkah laku yang melibatkan perencanaan agar dapat mengantisipasi suatu peristiwa di masa yang akan datang. Pengertian adaptasi sering dibaurkan dengan pengertian penyesuaian. Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungannya. Individu memiliki hubungan dengan ling-

kungannya yang menggiatkannya, merangsang perkembangannya, atau memberikan sesuatu yang ia perlukan. Adaptasi merupakan suatu respons pada situasi, sedangkan penyesuaian merupakan perubahan stimulus itu sendiri (Gerungan 2009).

Strategi merupakan suatu proses memenuhi syarat untuk dapat melangsungkan hidup dengan memenuhi kebutuhan. Fungsional berupa sistem menjamin kebutuhannya dari lingkungan dan mendistribusikan sumber-sumber dalam masyarakat fungsional dilakukan oleh sistem ekonomi. Strategi adaptasi nelayan Buruh diwujudkan dalam tindakan sosial yang artinya dilakukan oleh nelayan itu sendiri. Tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna arti subjek bagi dirinya (Damsar 2002).

Edi Suharto yang dikutip (Damsar, 2003) menyatakan strategi bertahan (*Coping strategies*) dalam perekonomian dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Strategi aktif

Yaitu strategi yang mengoptimalkan segala potensi untuk

melakukan aktivitas sendiri, memperpanjang jam kerja, memanfaatkan sumber atau tanaman liar dan lingkungan sekitar dan sebagainya.

2. Strategi Pasif

Yaitu strategi yang mengurangi pengeluaran guna memenuhi kebutuhan. Misalnya: pengeluaran sandang, pangan dan pendidikan.

3. Strategi Jaringan

Yaitu strategi yang mencakup dalam menjalin relasi, baik secara formal maupun informal dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan. Misalnya: meminjam uang ke Bank, rentenir dan sebagainya.

Bennet dalam Ahimsa (2003) membedakan antara perilaku adaptasi dengan strategi adaptasi. Perilaku adaptasi adalah, perilaku yang ditujukan untuk mengatasi masalah yang di hadapi atau untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan dan ini berbeda dengan strategi adaptasi. Strategi adaptasi didefinisikan sebagai pola-pola berbagai usaha yang direncanakan oleh manusia untuk dapat me-

enuhi syarat minimal yang dibutuhkannya dan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Pola-pola di sini adalah pola-pola perilaku atau tindakan.

Kemiskinan Struktural di Desa Maitara

Nelayan di Desa Maitara memulai aktivitas melaut pada pagi hari. Mereka berlayar di sekitar pulau Maitara bahkan ke laut lepas. Untuk nelayan pancing aktivitasnya di mulai dengan mencari umpan, setelah umpan diperoleh selanjutnya perburuan ikan dimulai. Nelayan pancing biasanya ketika melaut memakan waktu lebih dari satu hari bisa sampai seminggu bahkan lebih. Sebagai nelayan pancing ikan yang menjadi target adalah ikan besar seperti cakalang dan lain-lain, maka lokasi perburuannya pun jauh, mereka sering melakukan penangkapan di sekitar laut Bacan, karena di daerah ini terdapat banyak ikan. Kegiatan nelayan setelah melaut mereka melakukan kegiatan rutin seperti berbenah peralatan tangkap dan menjual hasil tangkapannya, biasanya hasil tangkapan tersebut di

pasarkan ke pasar ikan di Ternate atau di Tidore.

Sulitnya areal fishing ground dikarenakan nelayan Desa Maitara tidak hanya melakukan proses penangkapan di daerah Kota Tidore Kepulauan saja tetapi hingga ke daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan).

Jarak yang ditempuh nelayan untuk mencapai ke Kabupaten Halmahera Selatan (Bacan) sejauh 60 mi laut dan membutuhkan tambahan biaya operasional. Kelemahan dalam mengakses sumberdaya perikanan dikarenakan jarak dapat mempengaruhi terjadinya tambahan biaya untuk dilakukannya proses penangkapan ikan pada perairan yang potensial melimpahnya jumlah ikan.

Dalam mengatur setiap hal yang berkaitan dengan aktivitas pra tangkap hingga proses penjualan hasil tangkapan dilakukan dengan tidak melalui perencanaan pengandaan kebutuhan operasional secara terencana tetapi hanya berdasarkan kebiasaan yang sering dilakukan saat akan melaut. Proses pengadaannya tanpa dilakukan inventarisir berapa

kebutuhan, namun dilakukan dengan dasar perkiraan kebutuhan dan tidak dilakukan secara sistematis.

Sebagai pendukung kegiatan pemasaran, nelayan di desa Maitara memanfaatkan armada penampung. Armada penampung ini berupa berupa perahu motor dengan kapasitas muatan 3-5 GT yang di gerakan oleh mesin tempel dan memuat ABK antara 4-6 orang yang selalu mendampingi kegiatan penangkapan yang di lakukan oleh armada motor ikan atau pajeko. Ada juga nelayan yang menggunakan perahu sampan berukuran panjang antara antara 4-8 meter dan lebar 0,70-080 meter dengan menggunakan penggerak motor (katinting) berkekuatan antara 5,5-9 PK.

Kebijakan Pemerintah terkait pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan pendaratan ikan (PPI) serta Cold Storage sebagai tempat pendinginan hasil tangkap. Kebijakan pemerintah menjadi salah satu kekuatan untuk menunjang tingkat kesejahteraan melalui regulasi dan program pemerintah terhadap masyarakat pesisir sehingga ber-

dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat serta perluasan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan di sektor perikanan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan yaitu penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, pelatihan teknis nelayan, manajemen KUB perikanan tangkap, dan Pengadaan armada perikanan tangkap.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan pada masyarakat nelayan Maitara adalah dengan memberikan bantuan berupa, ketinting dan jala, hal ini dianggap kurang tepat sasaran karena daerah tangkapan yang berpotensi banyak ikan yaitu di sekitaran laut Halmahera Selatan (Bacan), untuk mencapai lokasi ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit maka kapal yang digunakan juga harus kapal besar. Dengan menggunakan kapal besar (pole and line) potensi untuk memperoleh banyak ikan lebih besar ketimbang menggunakan kapal kecil.

Masalah kemiskinan nelayan bukan hanya pada keterbatasan

teknologi, tapi juga pada permainan pasar di mana para tengkulak lebih diuntungkan karena permainan pasar yang merugikan nelayan, ikan yang diperoleh nelayan dibeli dengan harga mahal oleh tengkulak kemudian tengkulak menjual dengan harga 2 kali lipat. Ini perlu perhatian pemerintah untuk bisa mengantisipasi mengatur harga pasaran ikan agar para nelayan tidak dirugikan.

Secara khusus, penulis menemukan beberapa masalah klasik seperti pada uraian di atas yang menyebabkan pengelolaan perikanan sangat lambat terealisasi. Penulis merangkum beberapa temuan-temuan yang cukup variasi. Mulai dari penyaluran bantuan yang salah sasaran dan pilih kasih, pemberian bantuan yang tidak dapat dioperasikan, penarikan kembali bantuan, hingga penjualan kembali bantuan kepada pihak ketiga, serta lemahnya sistem kelembagaan ekonomi nelayan.

Mengamati masalah-masalah seperti itu, penulis berpendapat bahwa modeling atau sistem pengelolaan perikanan yang diterjemahkan oleh unsur teknis masih

sangat kaku dan belum sepenuhnya ditanggihkan untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat nelayan. Permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan perikanan secara terpadu di Maluku Utara, hendaknya tidak cukup pula pada penyaluran bantuan atau secara materiil, akan tetapi fokus masalah juga harus memperhatikan sistem bisnis perikanan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Monopoli bisnis dan penguasaan pasar secara sepihak sering juga dipertontonkan. Kasus bisnis perikanan yang juga sering ditemukan adalah melonjaknya harga ikan hingga tak menentu pada musim-musim tertentu, terbatasnya stok ikan di PPI, TPI, dan pasar-pasar lokal. Padahal, di sisi lain kebijakan pemerintah dengan kampanye-nya "Gemar Makan Ikan". Mestinya pembangunan sarana dan prasarana juga mempertimbangkan sistem bisnis perikanan, sehingga masyarakat tidak lagi dibuat "galau".

Nelayan di Maitara terbagi menjadi 2 golongan, yaitu nelayan pemilik dan buruh, nelayan buruh ialah nelayan yang tidak mempunyai

peralatan tangkap seperti kapal dan peralatan tangkap modern. Nelayan buruh hanya terlibat dalam proses penangkapan ikan, sedangkan pemilik ialah orang yang mempunyai peralatan tangkap seperti kapal, jaring dan lain-lain, pemilik juga yang menanggung biaya untuk bahan bakar, rokok dan makan bagi para nelayan dalam setiap kegiatan penangkapan ikan.

Di dalam sistem pembagian upah di desa Maitara, bagi hasil itu dilakukan dengan sistem *fifty-fifty*, yaitu sesudah hasil tangkapan dijual dan dikurangi untuk biaya operasi, sisanya dibagi dua antara buruh nelayan dengan pemilik kapal. Sistem bagi hasil seperti itu sepiantas memang kelihatan adil. Namun jika dicermati lebih jauh sistem bagi hasil yang demikian sebetulnya sangat timpang. Memang benar nelayan buruh dapat bagian setengah seperti yang diperoleh juragan, tetapi pada nelayan buruh, pendapatan yang setengah itu harus dibagi lagi dengan banyaknya anggota yang ada. Jika dalam satu kelompok penangkapan terdiri dari enam anggota, maka dapat dipastikan bahwa pendapatan buruh hanyalah

seperenam dari pendapatan juragan. Artinya, semakin besar anggota kelompok penangkapan yang dimiliki, maka ketimpangan dalam bagi hasil itu semakin besar.

Pendapatan nelayan yang tidak pasti di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor alam dan non alam. Penghasilan yang diperoleh nelayan ditentukan oleh faktor-faktor tersebut menjadikan pendapatan nelayan tidak bisa dipastikan. Pendapatan yang tidak menentu ini menjadikan kurang maksimalnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga nelayan, oleh karena itu nelayan belum dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Ketidakpastian pendapatan dan sedikit hasil pendapatan yang diperoleh oleh nelayan buruh seperti inilah yang seringkali menjadikan nelayan tersebut mengalami kekurangan dalam mencukupi kebutuhannya. Padahal nelayan merupakan kepala keluarga yang seharusnya dapat menafkahi istri dan anak-anaknya serta mencukupi kebutuhan keluarganya. Pendapatan yang tidak menentu setiap harinya tersebut yang seringkali menjadikan

nelayan mengalami kemiskinan akibat kurang terpenuhinya kebutuhan yang harus tercukupi, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Apabila hasil yang diperoleh tidak cukup maka kebutuhan pokok atau primer belum dapat tercukupi.

Pekerjaan menjadi nelayan bukanlah pekerjaan yang mudah dan mendapat penghasilan yang melimpah. Pekerjaan menjadi nelayan merupakan pekerjaan yang banyak menanggung risiko, tidak mudah, tidak bisa sewaktu-waktu dilakukan karena kondisi cuaca dan faktor yang menjadi kendala, dan pekerjaan yang penghasilannya tidak pasti. Ketidakpastian penghasilan yang diperoleh nelayan menjadikan nelayan harus mempunyai pekerjaan selain menjadi nelayan.

Nelayan bekerja ke ladang setelah melaut, akan tetapi hal ini tidak terjadi setiap waktu. Lebih sering nelayan ke ladang pada saat tidak melaut dikarenakan faktor-faktor tertentu misal faktor cuaca yang tidak memungkinkan untuk melaut, faktor musim ikan yang ketika melaut akan menghasilkan hasil tangkapan yang sedikit dan

faktor kondisi fisik nelayan. Selain menjadi petani, terdapat beberapa nelayan yang menjadi tukang bangunan. Hal itu juga dilakukan ketika mereka tidak melaut karena berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam melaut.

Diversifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh para nelayan guna menambah penghasilannya yang berfungsi dalam pemenuhan kebutuhan keluarganya yaitu nelayan melakukan pekerjaan sampingan, misalnya bagi nelayan yang punya ladang mereka mempunyai pekerjaan sampingan sebagai petani. Profesi sebagai petani biasanya dilakukan apabila musim kemarau yang berbarengan dengan musim tak ada ikan. Cuaca yang tidak menentu mengakibatkan beresikonya nelayan untuk melaut, sehingga nelayan lebih memilih tidak melaut dan memilih profesi lain.

Menjadi buruh bangunan merupakan salah satu cara yang dilakukan nelayan yang tidak memiliki ladang. Meski menjadi buruh bangunan hasil yang di dapatkan tidak seberapa dan tidak sewaktu-waktu pekerjaan itu ada, akan tetapi hasil yang diperoleh setidaknya bisa

membantu mencukupi kebutuhan keluarganya dan mengeluarkan nelayan dari derita kemiskinan.

Meskipun berbagai usaha yang telah dilakukan oleh nelayan dengan mencari pekerjaan lain belum juga bisa menjamin kesejahteraan nelayan, karena kebutuhan sehari hari mereka sangat besar, seperti kebutuhan pokok keluarga dan biaya sekolah anak, membuat mereka mencari bantuan kepada orang yang berada terutama kepada majikan mereka dengan meminjam sejumlah uang untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Hubungan yang di bangun antara majikan dan nelayan di Maitara sudah menjadi hubungan yang wajar, karena kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan.

Hubungan Patron Klien Nelayan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan alur pertukaran ekonomi pada usaha penangkapan ikan menunjukkan bahwa pemilik kapal bertindak sebagai pihak patron yang memiliki modal (*capital*), kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh terhadap nelayan buruh. Nelayan

buruh di sini diposisikan sebagai klien, yang menjadi bawahan dari patron. Pola hubungan patron-klien ini merupakan dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, wewenang, kekuasaan maupun penghasilan, sehingga klien ditempatkan dalam kedudukan yang lebih rendah dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi. Pola relasi yang ditemukan antara juragan dengan nelayan buruh di Maitara ini sesuai dengan ciri-ciri hubungan patron-klien.

Ketidakseimbangan status terjadi, banyak nelayan buruh di Desa Maitara terjerat hutang terutama pada masa paceklik. Buruh nelayan biasanya hutang kepada pemilik kapal. Adanya keterikatan hutang dan jaminan sosial menyebabkan nelayan buruh merasa ketergantungan terhadap pemilik kapal. Terlihat bahwa di sini terjadi ketidakseimbangan hubungan, dimana pemilik kapal dominan dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun terdapat hubungan dominatif, nelayan buruh sebagai klien tetap merasa tertolong dengan hutang dan jaminan sosial yang diberikan

oleh pemilik kapal, sebagai kompensasinya nelayan buruh tetap setia pada pemilik kapal.

Hal ini terlihat dari perilaku Pemilik kapal yang mengharapkan tenaga buruh nelayan Maitara dalam menjalankan usaha penangkapan ikan, pemilik kapal memiliki modal dan alat tangkap untuk penangkapan ikan di laut namun tidak memiliki tenaga yang banyak untuk menjalankan usahanya, di sini pemilik kapal membutuhkan tenaga para buruhnya untuk menjalankan usaha penangkapan ikan. Namun, di sisi lain kedudukan pemilik kapal tetap lebih tinggi dibandingkan dengan buruh nelayan karena pemilik kapal merupakan pihak yang memiliki modal, dan alat penangkapan ikan. Hal ini terlihat dari hubungan keterikatan pinjaman baik berupa uang maupun barang yang dibutuhkan buruh nelayan dari pemilik kapal, terutama pada musim barat tiba atau lebih dikenal dengan musim paceklik, untuk menyambung hidupnya dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga nelayan buruh biasanya hutang pada pemilik kapal. Pemilik kapal memberikan pinjaman kepada buruhnya tanpa meng-

gunakan bunga dan nelayan buruh bebas membayar kapanpun. Nelayan buruh (klien) merasa tertolong dari pinjaman yang diperoleh dari pemilik kapal (patron) tanpa menggunakan syarat apapun. Adanya keterikatan hutang antara klien pada patron menyebabkan rasa utang budi dan ikatan moral bagi buruh nelayan untuk tetap menjadi buruhnya.

Hal ini terlihat adanya relasi timbal-balik yang menempatkan klien di bawah dominasi dan bayang-bayang "utang budi" dari pemilik kapal sebagai patronnya. Dengan begitu, klien tidak dapat lepas dari ketergantungan "kekuaasaan" juragan nelayan. Tidak jarang para buruh nelayan sebagai klien semakin terjebak atau bahkan nyaman dalam keadaan relasi yang membuat ia tidak bisa meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Keterikatan hutang ini menjadi sebuah siklus yang berlangsung secara terus menerus. Relasi patron klien ini terbentuk untuk mengatasi persoalan ketidakpastian memperoleh pendapatan. Hal ini mengingat kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan tidak

sebanding dengan hasil kerja yang diperoleh.

Walaupun bersifat dominatif, masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi tersendiri. Dilihat dari pola relasinya, hubungan patron-klien antara pemilik kapal dengan buruh nelayan di sini bertujuan untuk mendapatkan keamanan pendapatan dan mendapatkan pekerjaan. pemilik kapal sebagai patron mengharapkan nelayan buruh dalam mencari keuntungan untuk mengembangkan kegiatan usaha ekonominya. Pada posisi ini pemilik kapal mempunyai peranan yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi khususnya dalam usaha perikanan karena memberikan jaminan modal dan membuka kesempatan kerja. Di sisi lain buruh nelayan sebagai klien juga berperan besar dalam keberlangsungan usaha patron, karena tanpa tenaga dari nelayan buruh maka akan mengancam keberlanjutan usaha pengumpul yang bertindak sebagai patron.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya

maka pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pada umumnya masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup dengan keterbatasan ekonomi. Karena bermata pencaharian menangkap ikan bukanlah hal yang mudah, banyak rintangan yang harus dihadapi seperti cuaca dan musim ikan yang tidak dapat diprediksi, ditambah lagi dengan keterbatasan sumber daya mengakibatkan pendapatan nelayan tidak menjadi menentu. Kondisi serba kekurangan juga bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi, melainkan juga dari segi sosial, budaya dan politik. Peran pemerintah di sini sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran baik itu berupa bantuan sesuai dengan kebutuhan nelayan, juga kebijakan tentang pemasaran yang selama dinilai merugikan nelayan.

Dengan keterbatasan ekonomi karena akibat dari ketidakpastian penghasilan tersebut membuat nelayan terpaksa mencari perlindungan kepada orang lain yaitu pemilik kapal guna dapat menjamin keberlangsungan hidupnya. Pola hubungan kerja yang tercermin dalam hubungan patron-klien antara pemilik dan buruh nelayan merupakan sebagai jaminan sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat. Mekanisme hubungan kerja ini bersifat ketergantungan, patron (nelayan pemilik) memiliki modal dan alat tangkap sedangkan klien (buruh) memiliki tenaga untuk menjalankan usaha pemilik perahu.

Hubungan patron-klien dapat menggerakkan kegiatan ekonomi karena memberikan lapangan kerja untuk buruh nelayan yang hasilnya sesuai perjanjian antara mereka sehingga berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka..

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, satria. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Apridar, dkk. 2012. *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haviland, A William. 1985. *Antropologi*. Edisi Keempat Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Iwan Setiawan, 2008, *Keragaman Pembangunan Perikanan Tangkap*. Bogor. Institut Pertanian Bogor
- Koentjaraningrat. 1977. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta. P. T. Dian Rakyat.
- _____1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- _____2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- _____2009. *keberdayaan nelayan dan dinamika Ekonomi Pesisir*. Jogjakarta: Amiruz Media.
- _____2000. *Nelayan Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mubyarto. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: Studi Antropologi Ekonomi di Dua Desa Pantai*. Jakarta. Rajawali press.
- Mulyana, Dedi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Rachmad Safa'at. 1998. *Perlindungan hukum Hak Adat Kelautan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*: Depok. UI.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Buku Sosiologi Suatu Pengantar*. Ed. Baru, Cetakan 38. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali.
- Scott, James C. 1983. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3S. Cetakan Kedua.
- _____1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sobur, Alex. 2004. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Rosda Karya.